



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANJARBARU

JALAN A.YANI KM 29,42 GUNTUNG MANGGIS, BANJARBARU 70724

TELEPON (0511) 4783155, FAKSIMILE (0511) 4783546

LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkpbanjarbaru@kkp.go.id

Yth.Sekretaris Badan PPMHKP
Cq. Ketua Tim Kerja Pengolahan Kinerja
di Jakarta

SURAT PENGANTAR
NOMOR B.821/BPPMHKP.BJB/TU.210/VII/2026

No.	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026	1 (satu) Berkas	Untuk dipergunakan sebagai bahan laporan.

Penerima
Nama Jabatan

Banjarbaru, 14 Juli 2026
Pengirim
Kepala Balai,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nama Lengkap
Diterima

Yuni Irawati Wijaya

tanggal No.

Hp



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II 2026

BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANJARBARU

Jl. A. Yani 29,4 Guntung Manggis,
Kec. Landasan Ulin,
Kota Banjarbaru,
Kalimantan Selatan,
70721



(0511) 4783155

bppmhkpbanjarbaru@kkp.go.id

bppmhkp.banjarbaru



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (LKj Balai PPMHKP Banjarbaru) Triwulan II tahun 2026 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai PPMHKP Banjarbaru dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan informasi terkait sasaran strategis organisasi dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Balai PPMHKP Banjarbaru Tahun 2026. Secara umum, pada Triwulan II tahun 2026 beberapa target indikator kinerja yang ditetapkan telah dicapai dengan baik.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja BPPMHKP di masa mendatang. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Banjarbaru, 14 Juli 2026
Kepala Balai PPMHKP Banjarbaru,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Yuni Irawati Wijaya, S.Pi, M.P.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	1
1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA	3
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	4
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	6
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	6
3.2 REALISASI ANGGARAN	20
BAB 4 PENUTUP	23
4.1 KESIMPULAN	23
4.2 REKOMENDASI	23
BAB 5 LAMPIRAN	26
5.1 PERJANJIAN KINERJA	25
5.2 PENGHARGAAN	26

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Balai PPMHKP Banjarbaru.....	2
Gambar 2. Dashboard capaian IK pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja	6
Gambar 3. Publikasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	20
Gambar 4. Perjanjian Kinerja Balai PPMHKP Banjarbaru Tahun 2026.....	25
Gambar 5. Piagam Penghargaan Balai PPMHKP Banjarbaru Sebagai Unit Organisasi Berpredikat Informatif Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan	26
Gambar 6. Piagam Penghargaan Balai PPMHKP Banjarbaru Sebagai Unit Organisasi Berpredikat Terbaik Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan	26

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai PPMHKP Banjarbaru TW II Tahun 2026	6
Tabel 2. Target dan Realisasi IK 1 pada Triwulan II Tahun 2026	8
Tabel 3. Target dan Realisasi IK 2 pada Triwulan II Tahun 2026	9
Tabel 4. Target dan Realisasi IK 3 pada Triwulan II Tahun 2026	10
Tabel 5. Target dan Realisasi IK 4 pada Triwulan II Tahun 2026	11
Tabel 6. Target dan Realisasi IK 5 pada Triwulan II Tahun 2026	12
Tabel 7. Target dan Realisasi IK 6 pada Triwulan II Tahun 2026	13
Tabel 8. Target dan Realisasi IK 7 pada Triwulan II Tahun 2026	14
Tabel 9. Target dan Realisasi IK 8 pada Triwulan II Tahun 2026	15
Tabel 10. Target dan Realisasi IK 9 pada Triwulan II Tahun 2026	16
Tabel 11. Target dan Realisasi IK 10 pada Triwulan II Tahun 2026	17
Tabel 12. Target dan Realisasi IK 11 pada Triwulan II Tahun 2026	18
Tabel 13. Target dan Realisasi IK 12 pada Triwulan II Tahun 2026	18
Tabel 14. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada Triwulan II 2026	21
Tabel 15. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan pada Triwulan II 2026.....	21
Tabel 16. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada Triwulan II 2026	21
Tabel 17. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan pada Triwulan II 2026.....	22

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai PPMHKP Banjarbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi Balai PPMHKP Banjarbaru. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BPPMHKP serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai PPMHKP Banjarbaru. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPMHKP, Kepala Balai PPMHKP Banjarbaru dibantu oleh 1 Pejabat Struktural yaitu Kepala Sub Bagian Umum (Tim Kerja Dukungan Manajerial), dan 3 Tim Kerja yaitu Pengendalian dan Pengawasan Mutu produksi Primer, Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Pascapanen, Manajemen Mutu.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai PPMHKP Banjarbaru sejumlah 26 pegawai yang terdiri dari 2 Pegawai Pejabat Struktural, 4 Pegawai Fungsional Inspektur Mutu, 4 Pegawai Fungsional Asisten Inspektur Mutu, 1 Pegawai Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda, 1 Pegawai Pranata Keuangan APBN Penyelia, 1 Pegawai Tata Usaha/Penelaah Teknik Kebijakan, dan 4 Pegawai Penata Layanan Operasional, 5 Pegawai Operator Layanan Operasional, 4 Pegawai Pengadministrasi Perkantoran. Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk *workforce* yang efektif dan efisien.

Struktur organisasi Balai PPMHKP Banjarbaru dapat dilihat dalam Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai PPMHKP Banjarbaru

1.3. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banjarbaru selama Tahun 2026. Capaian kinerja (*performance results*) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banjarbaru tahun 2026 dibandingkan dengan penetapan kinerja (*performance agreement*) tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum, Balai PPMHKP Banjarbaru telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama periode tahun 2026.

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banjarbaru triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar **111,11%**. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Manajerial (IKU/IKM) Balai PPMHKP Banjarbaru yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

Pada bulan Januari 2026 terjadi perubahan indikator kinerja Balai PPMHKP Banjarbaru menjadi 12 (dua belas belas) yang terbagi dalam 3 (tiga) sasaran kinerja yaitu :

- a. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan
- b. Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar
- c. Tatakelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Balai PPMHKP Banjarbaru

Pada Bulan Juni 2026 terjadi perubahan indikator kinerja Balai PPMHKP Banjarbaru pada indikator kinerja 12.

Uraian indikator kinerja yang capaiannya memenuhi dan/atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

- IK.1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (%)
- IK.2 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (%)

IK.3 Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)

Sasaran Kegiatan 2. Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar

IK.4 Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (%)

Sasaran Kegiatan 3. Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Banjarbaru

IK.5 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Indeks)

IK.6 Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)

IK.7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)

IK.8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Persen)

IK.9 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)

IK.10 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)

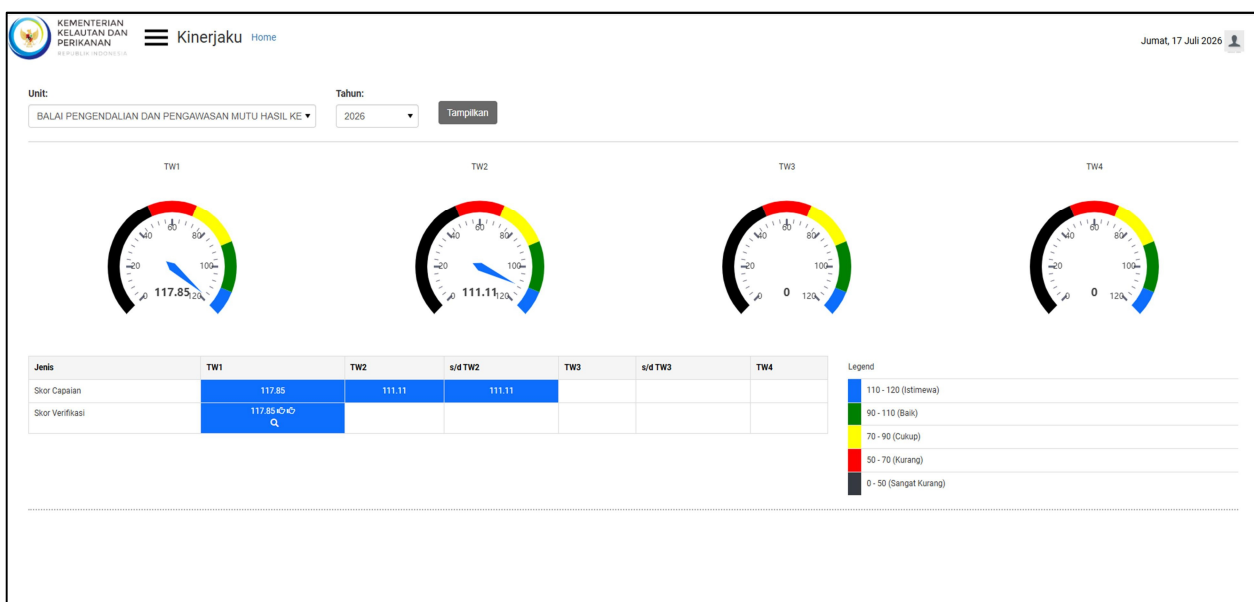
IK.11 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (%)

IK.12 Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Balai PPMHKP Banjarbaru pada triwulan II tahun 2026 masuk dalam kategori “**Istimewa**”, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar **111.11%** berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id.



Gambar 2. Dashboard capaian IK pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai PPMHKP Banjarbaru Triwulan II Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2026	TARGET TW II	REALISASI TW II
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (%)	72	72	70,40
		2	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (%)	72	72	93,31

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 2026	TARGET TW II	REALISASI TW II
		3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)	71	71	72,80
SK.2	Terselenggaranya Sistem Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar	4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (%)	72	-	-
SK3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Indeks)	82,5	75	81,54
		6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)	77	-	-
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)	86,2	-	-
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Persen)	86	86	100
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)	92,1	83	99,66
		10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)	71,75	-	-
		11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (%)	77	77	100
		12	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)	89	89	99,90

ANALISIS DAN EVALUASI

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan.

IK 1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (%)

Target dan realisasi kinerja Triwulan II pada Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Target dan Realisasi IK 1 pada Triwulan II Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TRIWULAN II TAHUN 2026			RENSTRA 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (%)	-	-	-	-	70	72	70,40	97,78	72	-

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) dan perikanan tangkap meliputi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di kapal yang telah sesuai dengan standar kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Semua sertifikasi ini penting untuk keberlangsungan usaha, terutama usaha pembenihan ikan. Dimana manfaat sertifikasi CPIB memproduksi benih ikan yang bermutu, menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan, mendukung implementasi ekonomi biru di sektor budidaya.

1. Meningkatkan Daya Saing Produk Benih Ikan
2. Menjamin Keberlangsungan Usaha Pembenihan
3. Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Produktivitas
4. Mampu Telusur (*Traceability*)
5. Memperkecil Resiko Kegagalan
6. Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan
7. Meningkatkan Daya Saing dengan Peningkatan Mutu serta Menjamin Kesempatan Ekspor

Triwulan 2 tahun 2026 ini belum ada realisasi sertifikasi mutu produksi primer juga disebabkan faktor lain yaitu kurangnya minat Pelaku usaha dalam sertifikasi karena dari segi faktor ekonomi secara langsung (tidak mempengaruhi perbedaan harga jual), Kurangnya Pengawasan terhadap Pelaku Usaha dalam berusaha. Target Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru Triwulan II adalah 72%. Realisasi Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru dalam kegiatan pada triwulan II realisasi sebesar 70,40 namun target dan realisasi pada semester II dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan dengan nilai 73,09% dengan capaian 105,68%.

IK 2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (%)

Sertifikasi penerapan PMMT/HACCP diberikan kepada Pelaku Usaha Industri Pengolahan Ikan telah memenuhi dan menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHP) pada setiap unit pengolahan ikan yang diterbitkan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (*hazard*) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Adapun target dan realisasi kinerja Triwulan II pada Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Target dan Realisasi IK 2 pada Triwulan II Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TRIWULAN II TAHUN 2026			RENSTRA 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (%)	-	-	-	-	70	72	93,31	130	70	-

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi Pasca Panen meliputi PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (yang telah sesuai dengan standar kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten).

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai menjaga kualitas memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan Pengolahan Distribusi hingga pemasaran produk perikanan Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada :

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius)
- 3 Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Pentingnya menjaga keamanan pangan dan mutu produk hasil perikanan baik untuk domestik dan luar negeri

Target Hasil Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru triwulan II adalah 72. Realisasi Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 93,31% dengan capaian 138%.

IK 3. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)

Target dan realisasi kinerja triwulan II pada Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Target dan Realisasi IK 3 pada Triwulan II Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TRIWULAN II TAHUN 2026			RENSTRA 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)	-	-	-	-	-	71	72,80	103	71	-

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai pengawasan mutu hasil kelautan perikanan di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran *marine biotoxin* dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil kelautan perikanan.

Kegiatan pengawasan ini dilaksanakan di kabupaten/kota dengan tingkat konsumsi ikan yang tinggi, dengan fokus lokasi pada pasar modern, pasar tradisional, TPI/PPI, yang produknya dikonsumsi oleh masyarakat lokal atau domestik. Pengawasan dilakukan melalui penilaian sarana dan prasarana serta pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji organoleptik, mikrobiologi, kimia, bahan berbahaya, serta parameter uji lain yang diperlukan. Selain itu, pemantauan juga dilakukan di wilayah perairan atau pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia untuk memastikan ikan atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku industri maupun konsumsi domestik bebas dari cemaran *marine biotoxin* dan bahan kimia berbahaya.

Setelah dilakukan analisa dan evaluasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru, diketahui bahwa pada Tahun 2026 ditargetkan nilai pengawasan mutu pada triwulan II sebesar 71. realisasi pengawasan mutu telah terlaksana sesuai target dengan realisasi sebesar 72,80% sesuai target yang telah ditetapkan

Sasaran Kinerja 2. Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang Konsisten sesuai Standar

IK 4. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (%)

Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan dinyatakan dalam bentuk persentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji ISO 17025 di laboratorium official control yang dinilai meliputi :

1. Ruang lingkup
2. Acuan normatif
3. Persyaratan umum
4. Persyaratan struktural
5. Persyaratan sumberdaya
6. Persyaratan proses
7. Persyaratan sistem manajemen

Target dan realisasi kinerja Triwulan II pada Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Target dan Realisasi IK 4 pada Triwulan II Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TRIWULAN II TAHUN 2026			RENSTRA 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (%)	-	-	-	-	-	72	-	-	72	-

Kegiatan pelaksanaan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu ke hilir di Kalimantan Selatan terus menerapkan ISO 17025 secara konsisten. Dapat terlihat dari kegiatan penerapan ISO diantaranya Kaji Ulang Manajemen, Kaji Ulang Dokumen, Audit Internal, Peningkatan Kompetensi Personil, dan sebagainya.

Target Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru Triwulan II adalah 72. Realisasi Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru pada Triwulan II tidak terdapat target tapi terdapat target tahunan dengan realisasi sebesar 97,89% sesuai target yang ditetapkan.

Sasaran Kinerja 3. Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Banjarbaru

IK 5. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Indeks)

Adapun target dan realisasi kinerja Triwulan II pada Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Target dan Realisasi IK 5 pada Triwulan II Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TRIWULAN II TAHUN 2026			RENSTRA 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Indeks)	-	-	-	-	82	75	81,54	108	82,5	-

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (PermenPAN dan RB No.38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Formula menghitung capaian indikator indeks profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Realisasi indikator indeks profesionalitas ASN lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Indeks) bersifat semesteran, terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi hasil capaian indeks seperti pejabat struktural yang telah selesai mengikuti diklat pimpinan dan masih terdapatnya ASN dengan kualifikasi Pendidikan SMU/SMK sederajat.

Target Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru telah ditetapkan sebesar 82,5. Pada triwulan II targetnya sebesar 75 sehingga realisasi Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru dapat dicapai sesuai yang ditetapkan dengan nilai realisasi sebesar 81,54 dengan capaian 108% dari target yang telah ditetapkan.

IK 6. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)

Adapun target dan realisasi kinerja triwulan II pada Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Target dan Realisasi IK 6 pada Triwulan II Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TRIWULAN II TAHUN 2026			RENSTRA 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)	-	-	-	-	70	-	-	-	77	-

Target Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas di lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru untuk tahun 2026 telah ditetapkan sebesar 77. Hingga berakhirnya periode pelaporan triwulan ini, pemenuhan dokumen tersebut masih berada pada tahap perencanaan sehingga belum terdapat angka realisasi yang dapat dicatatkan. Meskipun demikian, komitmen Balai PPMHKP Banjarbaru dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel tetap menjadi prioritas utama guna memastikan pembangunan Zona Integritas siap diimplementasikan.

IK 7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)

Adapun target dan realisasi kinerja triwulan II pada Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Target dan Realisasi IK 7 pada Triwulan II Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TRIWULAN I TAHUN 2026			RENSTRA 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)	85	85	85	82	86	-	-	-	86,2	-

Salah satu Rekomendasi Kemen PAN & RB dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2020 yakni "Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan". Untuk pencapaian hasil penilaian Inspektorat Jenderal sesuai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan PERMENPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil evaluasi atau rekonsiliasi kinerja yang dilakukan Biro Perencanaan (*Rapid Assessment*) diharapkan dapat melengkapi keterbatasan Inspektorat Jenderal, sehingga KKP memiliki gambaran yang lebih menyeluruh terkait kualitas implementasi SAKIP di seluruh unit kerja. Namun masih ditemukan beberapa kekurangan pada redaksi dokumen-dokumen SAKIP Balai PPMHKP Banjarbaru yang disampaikan melalui Gdrive, LKE Aplikasi E-kinerjaku KKP dan Aplikasi ESR Menpan.

Pelaksanaan Penilaian Mandiri SAKIP di lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru dijadwalkan untuk menilai empat aspek utama, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Target nilai yang ditetapkan untuk tahun 2026 adalah sebesar

86,2. Hingga berakhirnya periode pelaporan triwulan ini, seluruh tahapan penilaian masih berada dalam tahap persiapan administratif. Oleh karena itu, belum terdapat realisasi angka capaian yang dapat dilaporkan pada periode berjalan ini. Meski demikian, target kinerja tahunan tetap menjadi acuan utama dalam pelaksanaan agenda mandiri oleh Sekretariat BPPMHKP selanjutnya.

IK 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Persen)

Untuk menunjang kinerja yang cepat dan transparan pengawasan dan pengendalian internal tetap dilaksanakan dengan mengacu pada rekomendasi Inspektorat Jenderal KKP. Kegiatan ini didukung oleh penggunaan aplikasi berbasis web yang mempermudah pemantauan pengawasan agar lebih efisien.

Adapun target dan realisasi kinerja Triwulan II pada Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 Target dan Realisasi IK 8 pada Triwulan II Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TRIWULAN I TAHUN 2026			RENSTRA 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Persen)	65	70	75	85	85	86	100	116	86	

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti secara tuntas dicatat hingga waktu pengukuran. Untuk menunjang kinerja yang cepat dan transparan, pengawasan dan pengendalian internal tetap dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi pada kegiatan pengawasan sebelumnya dengan hasil Tindak Lanjut **TUNTAS** pada aplikasi SIDAK KKP, serta tetap mengacu pada regulasi terbaru.

Setelah dilakukan analisa dan evaluasi target Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru di targetkan 86%, dengan realisasi mencapai 100% lebih dari yang ditetapkan.

IK 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)

Adapun target dan realisasi kinerja Triwulan II pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Target dan Realisasi IK 9 pada Triwulan II Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TRIWULAN II TAHUN 2026			RENSTRA 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)	89	89	93,75	93,76	92	83,00	99,66	120	92,1	

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Kualitas Perencanaan Anggaran yang terdiri dari (Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA), Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari (Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM), Kualitas Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari (Capaian Output), pada tahun 2026 masih terdapat kelemahan pada indikator deviasi halaman III DIPA terkait dengan pelaksanaan Rencana Penarikan Dana (RPD), penyerapan anggaran yang tidak sesuai target, serta terdapat kendala pada data anggaran yang termasuk efisiensi.

Hingga berakhirnya periode laporan pada triwulan ini, realisasi nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru masih tercatat nihil atau belum menunjukkan adanya capaian angka. Meskipun demikian, target kinerja pelaksanaan anggaran untuk tahun 2026 telah ditetapkan sebesar 92,10. Berdasarkan data pemantauan saat ini target triwulan II sebesar 83% dengan realisasi mencapai 99,66% dari target yang ditetapkan.

IK 10. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Permasalahan terkait pemahaman integrasi antara web berbasis MONEV/SMART Kemenkeu dengan aplikasi SAKTI perlu dilakukan keselarasan dari semua pengguna aplikasi SAKTI agar data yang dihasilkan akurat, sesuai target, dan tepat waktu.

Adapun target dan realisasi kinerja triwulan II pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Target dan Realisasi IK 10 pada Triwulan II Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TRIWULAN II TAHUN 2026			RENSTRA 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)	86	81	82	82	71,5	-	-	-	71,75	-

Untuk menunjang nilai kinerja anggaran, dilakukan perbandingan antara data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya, disertai pengendalian secara berkala. Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga harus memperhatikan sosialisasi dan arahan dari Tim Kinerja BPPMHKP agar nilai capaian dapat terpenuhi sesuai ketentuan.

Target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru untuk tahun 2026 telah ditetapkan sebesar 71,75. Memasuki periode Triwulan II, parameter penilaian terhadap target yang telah ditentukan tersebut masih menunjukkan angka 0%. Hal ini dikarenakan belum adanya realisasi pelaksanaan anggaran yang dapat diinput ke dalam sistem penilaian pada triwulan berjalan. Meskipun target tetap menjadi acuan utama kinerja organisasi, seluruh indikator capaian saat ini masih berada dalam tahap perencanaan.

IK 11. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (%)

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang/jasa lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga perlu adanya pemahaman dan kelengkapan dokumen untuk keperluan tata kelola pengadaan barang dan jasa agar sewaktu dilakukan penilaian dapat memperoleh hasil yang sesuai target dengan ketentuan waktu dalam pemenuhan dokumen. Termasuk dalam hal penyampaian rencana umum pengadaan PBJ pada aplikasi SIRUP.

Adapun target dan realisasi kinerja triwulan II pada Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Target dan Realisasi IK 11 pada Triwulan II Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TRIWULAN II TAHUN 2026			RENSTRA 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (%)	-	75	77,5	80	76	77	100	129	76	-

Untuk menunjang nilai tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya dengan pengendalian secara berkala pada aplikasi SIRUP/LPSE dan 6 Indikator lainnya yang tertuang dalam surat Inspektorat Jenderal KKP hasil pengawasan tata kelola pengadaan barang/jasa. Target yang ditetapkan pada Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru tahun 2026 adalah 77. Realisasi persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru dalam hal ini telah dilaksanakan dengan capaian 129%.

Pada Triwulan II Tahun 2026, penyesuaian postur anggaran Balai PPMHKP Banjarbaru berdampak pada penginputan rencana umum pengadaan barang/jasa di Aplikasi SIRUP, terutama karena tidak terdapat belanja pengadaan pada kode anggaran (53). Untuk menanggapi hal ini, Balai PPMHKP Banjarbaru telah melaksanakan pembaruan data secara berkala di Aplikasi SIRUP KKP, sehingga pelaksanaan rencana pengadaan barang/jasa tetap berjalan cepat, akuntabel, transparan, sesuai regulasi terbaru, dan mendukung penyesuaian sistem penganggaran dengan capaian realisasi 100%.

IK 12. Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)

Adapun target dan realisasi kinerja triwulan II pada Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Target dan Realisasi IK 12 pada Triwulan II Tahun 2026

INDIKATOR KINERJA	TAHUN					TRIWULAN II TAHUN 2026			RENSTRA 2025-2029	
	2021	2022	2023	2024	2025	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI
Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)	-	-	-	-	89	89	99,90	112	89	-

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik terutama di lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru. Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dengan mengakses aplikasi survey kepuasan masyarakat dengan alamat: <http://ptsp.kkp.go.id/skm/login>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat diakses oleh kepada pengguna jasa di masing-masing UPT BPPMHKP. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana.

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik serta pembaharuan tiada henti untuk meningkatkan kualitas layanan agar masyarakat tentang kualitas layanan pada Balai PPMHKP Banjarbaru semakin prima dan membekali petugas pelayanan dengan kompetensi mengenai pelayanan publik yang baik.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi pemenuhan layanan publik agar sesuai dengan 9 unsur yang telah ditetapkan termasuk dengan memberikan bimbingan kepada pengguna layanan terkait proses pengisian SKM agar SKM Balai PPMHKP Banjarbaru mendapatkan Survey minimal sesuai target. Selain itu SKM diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas, prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Target yang ditetapkan pada Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru tahun 2026 adalah 89. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru pada Triwulan II dengan realisasi 99,90 dan capaian sebesar 112.

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP) lingkup BPPMHKP Triwulan II Tahun 2026																
NO	OP	INDEKS DAN NILAI PER-UNSUR LAYANAN									INDEKS	NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Metode SKM
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
1	Stasiun PPMHKP Palu	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	27	Online
2	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	11	Online
3	Stasiun PPMHKP Tahuna	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	2	Online
4	Balai PPMHKP Banjarbaru	3,99	4,00	3,99	4,00	4,00	4,00	3,99	3,99	3,99	4,00	99,90	A	Sangat Baik	142	Online
5	Stasiun PPMHKP Merak	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,96	4,00	4,00	4,00	4,00	99,90	A	Sangat Baik	27	Online
6	Stasiun PPMHKP Gorontalo	4,00	3,98	3,98	3,98	4,00	3,98	4,00	3,98	3,98	3,99	99,72	A	Sangat Baik	59	Online
7	Balai PPMHKP Jayapura	3,88	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,99	99,65	A	Sangat Baik	8	Online
8	Stasiun PPMHKP Pangkal Pinang	4,00	3,98	3,98	3,97	3,98	3,98	3,98	3,98	3,97	3,98	99,57	A	Sangat Baik	64	Online
9	Stasiun PPMHKP Ternate	3,96	3,98	3,98	3,98	3,98	3,96	3,96	3,96	3,96	3,97	99,25	A	Sangat Baik	52	Online
10	Balai PPMHKP Surabaya II	4,00	3,99	3,99	3,99	3,99	3,90	3,85	3,99	3,99	3,97	99,16	A	Sangat Baik	119	Online
11	Balai PPMHKP Makassar	3,96	3,97	3,97	3,96	3,97	3,95	3,96	3,96	3,96	3,96	99,08	A	Sangat Baik	363	Online
12	Balai PPMHKP Ambon	3,97	3,97	3,93	3,97	3,96	3,95	3,96	3,97	3,96	3,96	99,00	A	Sangat Baik	100	Online
13	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	3,97	3,96	3,97	3,94	3,96	3,94	3,94	3,95	3,96	3,95	98,86	A	Sangat Baik	234	Online
14	Stasiun PPMHKP Pontianak	4,00	4,00	3,99	4,00	4,00	3,89	3,88	3,89	3,89	3,95	98,72	A	Sangat Baik	74	Online
15	Balai PPMHKP	3,92	3,92	3,86	3,92	3,94	3,93	3,91	3,94	3,95	3,92	98,00	A	Sangat Baik	111	Online

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 3. Publikasi Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

3.2 REALISASI ANGGARAN

Kinerja Keuangan Balai PPMHKP Banjarbaru Triwulan II Tahun 2026 melalui Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 4.636.320.000,- (*empat milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*). Realisasi penyerapan anggaran Balai PPMHKP Banjarbaru pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai Rp. 2.191.766.324,- (*dua milyar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah*) atau sebesar 47.27 %..

Alokasi anggaran Balai PPMHKP Banjarbaru Triwulan II pada Tahun 2026 sebesar Rp. 4.636.320.000,- (*empat milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*). Anggaran ini terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp 4.490.495.000,- (*empat milyar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) dan PNPB sebesar Rp 145.825.000,- (*seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*). Sampai Triwulan II Tahun 2026 realisasi penyerapan anggaran Balai PPMHKP Banjarbaru mencapai Rp 2.191.766.324,- (*dua milyar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah*) atau sebesar 47.27 %.

Rekapitulasi penyerapan anggaran Balai PPMHKP Banjarbaru T.A 2026 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan disajikan pada Tabel 14 dan Tabel 15.

Tabel 14. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada Triwulan II 2026

NO	KODE/NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	Pegawai	3.535.068.000	1.751.948.678	1.783.119.322	49.56
2	Barang	1.101.252.000	439.817.646	661.434.354	39.94
3	Modal	0	0	0	0
	TOTAL	4.636.320.000	2.191.766.324	2.444.553.676	47.27

Tabel 15. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan pada Triwulan II 2026

NO	KODE/NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	3989/ Pengendalian Mutu	95.444.000	18.990.000	76.454.000	19.90
2	7010/ Manajemen Mutu	82.500.000	3.000.000	79.500.000	3.64
3	3987 / Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	3.535.068.000	1.751.948.678	1.783.119.322	49.56
	TOTAL	4.636.320.000	2.191.766.324	2.444.553.676	47.27

Balai PPMHKP Banjarbaru di bulan April 2026 melakukan revisi pengurangan anggaran untuk belanja barang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga pagu efektif di triwulan II hanya sebesar Rp. 4.566.279.000,- (*empat milyar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*)

Rekapitulasi penyerapan anggaran Balai PPMHKP Banjarbaru T.A 2026 berdasarkan jenis belanja dan jenis kegiatan setelah revisi buka blokir disajikan pada Tabel 16 dan Tabel 17.

Tabel 16. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja pada Triwulan II 2026

NO	KODE/NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	Pegawai	3.535.068.000	1.753.568.678	1.781.499.322	49.60
2	Barang	1.031.211.000	439.817.646	591.393.354	42.60
3	Modal	0	0	0	0
	TOTAL	4.566.279.000	2.193.386.324	2.372.892.676	48.03

Tabel 17. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan pada Triwulan II 2026

NO	KODE/NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
1	3989/ Pengendalian Mutu	63.723.000	18.990.000	44.733.000	29.80
2	7010/ Manajemen Mutu	44.180.000	3.000.000	41.180.000	6.79
3	3987 / Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	4.458.376.000	2.171.396.324	2.286.979.676	48.70
	TOTAL	4.566.279.000	2.193.386.324	2.372.892.676	48.03

BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari capaian-capaian yang telah dilaksanakan pada kinerja triwulan II Tahun 2026 juga menjawab beberapa rekomendasi permasalahan dan kendala pada triwulan sebelumnya, diantaranya : Telah dilakukan Update berkelanjutan skema Rencana Penarikan Dana (RPD) sesuai jadwal dari Kementerian Keuangan RI secara berkala agar pelaksanaan kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan rencana pada Halaman III DIPA. Serta melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pencapaian IKU dan IKM yang dilakukan setiap bulan bertepatan dengan Rapat Bulanan oleh masing masing penanggung jawab kegiatan dan keuangan Balai PPMHKP Banjarbaru. Dan juga telah dilakukan perubahan (efisiensi) struktur anggaran sesuai dengan perintah Perpres 01 Tahun 2025 yang menjadi prioritas nasional.

Laporan Kinerja (LKj) Balai PPMHKP Banjarbaru Triwulan II Tahun 2026 menyajikan keberhasilan capaian sasaran strategis Balai PPMHKP Banjarbaru pada periode kedua tahun anggaran 2026, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Terhadap capaian IKU dan IKM tersebut dilakukan perbandingan terhadap target triwulan dan target tahunan sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Secara umum, capaian sasaran strategis dan IKU dan IKM Balai PPMHKP Banjarbaru yang diperjanjikan telah tercapai sesuai rencana dan target yang ditetapkan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan II tahun 2026 dan akan coba diperbaiki pada Triwulan III, antara lain:

1. Berdasarkan hasil evaluasi pada TW I (Telah dilaksanakan monitoring evaluasi kinerja secara periodik melalui rapat bulanan dan apel pagi sehingga target indikator kinerja yang telah disusun dapat tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja Balai PPMHKP Banjarbaru Tahun 2026;
2. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) pada bulan Juni 2026:
 - **Sebelumnya** : Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Indeks) (Target 3.5)
 - **Menjadi** : Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)" (Target 89)
 - **Sebelumnya** : Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (%) (Target 71)
 - **Menjadi** : Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang DitetapkanLingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (%) (Target 72)

3. Tim Perencanaan dan Program telah melakukan Update skema Rencana Penarikan Dana (RPD) dan telah melakukan revisi buka blokir, namun setelah melakukan revisi tim program dari eselon I melakukan penundaan revisi buka blokir (Data Dukung Surat Usulan Revisi).

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Balai PPMHKP Banjarbaru pada Triwulan II tahun 2026, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Tim Perencanaan dan Program agar melakukan Update skema Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk setiap triwulan di Tahun 2026 sesuai jadwal dari Kementerian Keuangan RI agar pelaksanaan kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan Rencana pada Halaman III DIPA dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan Kementerian Keuangan;
2. Tim Perencanaan dan Program agar menyiapkan revisi anggaran terkait buka blokir dana PNBK.
3. Jadwal audit lapangan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dijadwalkan pada Bulan 25-26 Mei 2026, dikarenakan adanya revisi anggaran dan pemblokiran dana maka kegiatan tersebut belum terlaksana.

BAB 5 LAMPIRAN

Perjanjian kinerja dan penghargaan yang diraih oleh Balai PPMHKP Banjarbaru selama tahun 2026.

5.1 PERJANJIAN KINERJA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110, NOTAR POS 4130 JPP 10841
 TELEPON (021) 3519275 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
 LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN BANJARBARU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yuni Irawati Wijaya**
 Jabatan : Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banjarbaru

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ishartini**
 Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Juni 2026

PIHAK KEDUA
 Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani Secara Elektronik
Ishartini

PIHAK PERTAMA
 Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banjarbaru



Ditandatangani Secara Elektronik
Yuni Irawati Wijaya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN BANJARBARU

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
SK.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan (Nilai)	72
	2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (%)	72
	3. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)	71
SK.2 Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4. Persentase Implementasi Metode Terasar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (%)	72
	5. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Indeks)	82,5
SK.3 Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Banjarbaru	6. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)	77
	7. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)	86,2
	8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Persen)	86
	9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)	92,1
	10. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)	71,75
	11. Persentase rencana umum pengajaran PBU yang diumutikan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (%)	77
	12. Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Banjarbaru (Nilai)	89

Data Anggaran

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Banjarbaru	4.458.376.000
2.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	95.444.000
3.	Manajemen Mutu	82.500.000
Total Anggaran Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Banjarbaru Tahun 2026		4.636.320.000

Jakarta, 17 Juni 2026

PIHAK KEDUA
 Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani Secara Elektronik
Ishartini

PIHAK PERTAMA
 Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banjarbaru



Ditandatangani Secara Elektronik
Yuni Irawati Wijaya

Gambar 4. Perjanjian Kinerja Balai PPMHKP Banjarbaru Tahun 2026

5.2 PENGHARGAAN



Gambar 5. Piagam Penghargaan Balai PPMHKP Banjarbaru Sebagai Unit Organisasi Berpredikat Informatif Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan



Gambar 6. Piagam Penghargaan Balai PPMHKP Banjarbaru Sebagai Unit Organisasi Berpredikat Terbaik Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan